



RENCANA KERJA AWAL 2024

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN
2023**

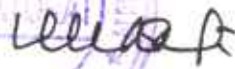


KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kinerja awal sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Sebagai suatu rancangan awal, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Rencana Kerja ini masih memerlukan beberapa tahapan proses untuk ditetapkan menjadi Rencana Kerja.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada, diharapkan seluruh Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk secara bersama-sama berperan aktif seta berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tabanan, 10 Agustus 2023
INSPEKTUR KABUPATEN
TABANAN,

Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661030 198610 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2. Tinjauan Terhadap RPJMD-SB Kabupaten Tabanan	30
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan	31
3.4. Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN	40
BAB V PENUTUP	46



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2022 (Renstra 2021 – 2026)	14
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	22
3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	30
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan T.A.2024	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) bersih (Clean Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Salah satu perencanaannya Perangkat Daerah yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Hal ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, dimana dalam penyusunan Rencana Kerja harus memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indicator dan pendanaan serta rancangan awalnya telah dibuat bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan,

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dari Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023, adalah:

- (1). Landasan Idil yaitu Pancasila;
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- (3). Landasan Operasional :



1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangnan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
 15. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020. Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14).
30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran



Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

32. Perda Kabupaten Tabanan No 11 tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Awal Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.



2. Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Awal Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten daerah Tabanan Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah LKjIP) Inspektorat daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan dari pada penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 dan prakiraan capaian tahun berjalan (2023), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dengan pencapaian target Rencana Strategis



Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menjelaskan penelahaan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan. Disamping itu juga memuat rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Bab ini menguraikan pengertian Rencana Program yaitu Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab.V Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Awal Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) maka perlu diupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang terukur melalui penyusunan perencanaan dan pelaporan yang baik dan terukur. Penilaian perencanaan dan pelaporan yang terukur dilakukan melalui evaluasi rencana kerja.

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah guna tercapainya visi Kabupaten Tabanan, melalui beberapa program maupun kegiatan.

Mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 sebagaimana tertera pada Tabel 2.1., bahwa pada pada Inspektorat Daerah Kabupaen Tabanan terdapat 3 (tiga) program, dengan 11 (Sebelas) kegiatan. Adapun rincian capaian target kinerja pada tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

- A. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan
 - 1. Program yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:



Pada tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan terdapat 3 (tiga) program, dimana 1 program tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai dengan yang direncanakan. Adapun program tersebut adalah:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan realisasi 75% dari target 100%
2. Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan realisasi 50% dari target 100%.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, dengan realisasi 66,67% dari target 100%
- B. Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.
 1. Program yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:
 - a. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dimana realisasinya sesuai dengan target yaitu 100%
 2. Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - g. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - h. Pendampingan dan Asistensi.

Semua kegiatan tersebut realisasinya sesuai dengan target yaitu 100%



C. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

1. Program yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana targetnya 100% sedangkan realisasinya mencapai 130%.
2. Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran:
 - a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi mencapai 340% dari target 100%

D. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhnya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

1. Faktor penyebab tidak terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan

Sebagaimana telah diuraikan di atas (point A) bahwa terdapat 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan yang realisasi target kinerjanya tidak tercapai.

Tidak tercapainya target kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan sangat erat kaitannya dengan tidak tercapainya realisasi target kinerja salah satu kegiatannya, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Sedangkan penyebab tidak tercapainya realisasi target kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, karena memang pada tahun 2022 di Kabupaten Tabanan tidak terdapat Perangkat Daerah yang melakukan tindakan yang berdampak terhadap Kerugian Negara.

Untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, tidak tercapainya realisasi target kinerja karena Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak memperoleh dukungan penganggaran. Namun tidak tercapainya realisasi target kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



Pemerintahan Daerah ini tidak memberikan dampak terhadap yang signifikan terhadap realisasi target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Faktor penyebab Target Kinerja Program/Kegiatan Melebihi Target.

Realisasi target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melebihi target disebabkan oleh:

- a. Beberapa kegiatan pendukungnya realisasi target kinerjanya sesuai dengan yang ditargetkan, adapun kegiatan tersebut:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi target kinerja mencapai 340%
- c. Anggaran sub-sub kegiatan memadai

E. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai akibat tidak tercapainya target kinerja tersebut, maka berdampak terhadap tidak tercapainya capaian program dari Rencana Strategis baik itu capaian program tahun 2022 maupun terhadap capaian program diakhir periode Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan.

G. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut.

Kebijakan/tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:



1. Dari segi penganggaran, selain mengupayakan peningkatan anggaran dari APBD Kabupaten Tabanan dimana saat ini baru terpenuhi 0,70% dari target 1%, juga yang perlu dilakukan adalah melaksanakan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (BPKP dan BPK) agar memperoleh dukungan pendanaan khususnya bimbingan teknis bagi pejabat fungsional Disamping itu, melaksanakan skala prioritas penganggaran juga harus dilakukan.
2. Dari segi perencanaan, yang harus dilakukan adalah melaksanakan reviu terhadap Rencana Strategis dimana Program/Kegiatan yang kurang strategis atau tidak mendukung pencapaian target kinerja kiranya perlu dihilangkan. Demikian pula halnya perlu ada penambahan Program/Kegiatan baru yang mendukung pencapaian target kinerja.



Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2022 (Renstra 2021 – 2026)

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2023	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
					TARGET RENJA TAHUN 2022	REALISASI RENJA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
I	01	Inspektorat								
		I. RENSTRA 2021- 2026								
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI PD	100%	95%	100%	130%	130	100%	108%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	10 Dok	2 Dok	2 Dok	2	100	2 Dok	6 Dok
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15 Dok	3 Dok	3 Dok	3	100	3 Dok	9 Dok



			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0	2 Dok	40
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	340%	340	100%	180%	180
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	55 orang	10 orang	10 orang	34 orang	340	30 orang	74 orang	134,54
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Bahan Logistik	Persentase								



Kabupaten Tabanan

			Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	100%	0	100%	0	0	100%	33,33%	33,33
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Pengadaan Peralatan dan	Persentase Pengadaan								



		Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	0	66,67%	66,67
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	66,67%	100%	66,67%	66,67	100%	77,78%	77,78
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100



Kabupaten Tabanan

			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dn bangunan lainnya	yang l pelihara Persentase Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dn bangunan lainnya yang terpenuhi	100%	0	100%	0	0	100%	33,33%	33,33
		02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN	100%	100%	100%	75%	75	100%	46,5%	46
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100	46,1%	46,1
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	59 LHP	43 LHP	4 LHP	4 LHP	100	4 LHP	51 LHP	87
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah	64 LHP	18 LHP	12 LHP	12 LHP	100	12 LHP	42 LHP	65
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 LHP	2 LHP	3 LHP	3 LHP	100	3 LHP	8 LHP	26
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	18 LHP	4 LHP	4 LHP	4 LHP	100	4 LHP	12 LHP	66
			Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil pengawasan Desa	52 laporan	10 LHP	12 LHP	12 LHP	100	12 LHP	34 LHP	65



			Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2	0	0	0	0	0	0	0
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	58 LHP	12 LHP	12 LHP	12 LHP	100	12 LHP	36 LHP	62
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	50%	50	100%	50%	50
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	10	0	2 LHP	0	0	2 LHP	2	20
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 LHP	12 LHP	6 LHP	6 LHP	100	6 LHP	24 LHP	80
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG TELAH DI LAKSANAKAN	100%	100%	100%	100%	100	100%	80%	80
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	0	100%	100%	100	100%	60%	60
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	10 Dokumen	2	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60



Kabupaten Tabanan

				Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	90%	90
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	100	40	40 OPD	100
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian, Reformasi Birokrasi urusan pemerintah daerah	42 OPD	42 OPD	42 OPD	42 OPD	100	42	42 OPD	100
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	40 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100	8 Laporan	24 Laporan	60
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi pencegahan integritas	Jumlah laporan pelaksanaan survei penilaian integritas	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Pengawasan yang merupakan sebagai fungsi dari Inspektorat memiliki tugas yang penting untuk mengawal pencapaian tujuan pembangunan. Hal yang paling krusial adalah mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya memberikan nasihat dan mengawal pelaksanaan program prioritas agar tidak menyalahi aturan sehingga para pelaksana tidak mengalami keraguan dalam melaksanakan tugasnya

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada pasal 1 point 12 menyebutkan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak. Dan sudah tentu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini perlu dilakukan evaluasi guna mencapai pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui analisa kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator yang ditetapkan. Adapun indikator kinerja sasaran yang menjadi tolok ukur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah "**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Memenuhi SAP**". Penetapan indikator ini melalui pemahaman visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani (AUM), dan pendalaman misi khususnya Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022 realisasinya sesuai target yaitu 100%. Gambaran secara rinci tentang evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022 untuk indikator kinerja utama disajikan pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	DKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Proyeksi				Capaian Aktual
				Tba 2023	Tba 2023	Tba 2024	Tba 2025	Tba 2026	Tba 2023	Tba 2023	Tba 2024	Tba 2025	Tba 2026	Tba 2023	Tba 2024	Tba 2025	Tba 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAs	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	-	100	100	100	100	100	100					100	100	100	100	Realisasi capaian sesuai dengan target tidak terlepas dari dukungan anggaran yang memadai



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Paradigma Inspektorat tidak lagi menjadi *watchdog* tetapi sebaga *catalyst* yang menjalankan fungsi sebagai *quality assurance* dan *consulting* dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance*, maka aktivitas pengawasan intern yang dilakukan meliputi:

- Pemantauan;
- Evaluasi;
- Reviu; dan
- Audit.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi sebagai *consulting*, maka aktivitas pengawasan internnya meliputi:

- Sosialisasi;
- Asistensi; dan
- Bimbingan Teknis.

Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP A menjadi suatu keharusan dalam opini laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Tabanan. Untuk mencapai opini WTP penerapan manajemen resiko dan maturitas resiko menjadi suatu keharusan. Untuk mencapai nilai SAKIP A melalui peningkatan evaluasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah:



“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul Madani (AUM)”

2.4. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan yang baik dan benar, sebuah tujuan bisa didapat dengan lebih baik pula.

Terdapat beberapa metode dalam penyusunan perencanaan. Namun usulan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024 berasal dari kebutuhan perangkat daerah dan masukan dari para pemangku kepentingan (*Bottom up Planning*) baik secara langsung, aplikasi pengaduan dan hasil Murenbangcam. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut sebelum dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan tahun 2024, terlebih dahulu disinkronisasikan dengan analisa kebutuhan, isue-isue penting serta program dan tupoksi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan. Usulan kegiatan hasil sinkronisasi terdiri dari 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, untuk lebih jelasnya tentang rincian usulan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4., berikut di bawah ini.



Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1					2	3	4	5	
6					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
6	01				Inspektorat				
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah/kabupaten/Kota	Kab. Tabanan,	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kab. Tabanan,	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dok	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Dok	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	100%	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabanan	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.06		Administrasi Kepagawain Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase SDM yang bersertifikat	100%	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tabanan	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	30 Or	
6	01	01	2.06		Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya pemangjang administrasi umum perkantoran	100%	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tabanan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Pkt	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tabanan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Pkt	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tabanan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Pkt	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tabanan	Jumlah barang betakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang terpenuhi	106 Dok	
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tabanan	Jumlah bahan/material yang disediakan	1 Pkt	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Lap	
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tabanan	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi	100%	
6	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	15 Unit	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabanan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabanan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabanan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Lap	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, operasional atau lapangan	Kab. Tabanan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	23 Unit	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Tabanan	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tabanan		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Tabanan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	7 LHP	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah daerah	12 LHP	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tabanan	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	3 LHR	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tabanan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	4 LHR	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Kab. Tabanan	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	10 LHP	



Kabupaten Tabanan

6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen kesepakatan	1 Kesepakatan	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	12 Dok	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tabanan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Lap	
6	01	02	2.02	02	Penanganan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tabanan	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	3 Lap	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	100%	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Persentase Kebijakan Teknis dan Fasilitas Pengawasan yang dapat Dirumuskan	100%	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Tabanan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang diusun	2 Dok	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Pendampingan dan Asistensi	100%	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah	40 PD	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tabanan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan	40 PD	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tabanan	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.	12 Kali	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti diketahui bahwa Visi dari Pemerintahan Presiden Republik Indonesia adalah: Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan salah satu Misinya adalah Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

A. Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomoer 15 Tahun 2006 dengan bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan tata kelola keuangan negara agar berkualitas dan bermanfaat mempunyai visi :

MENJADI LEMBAGA PEMERIKSA TERPERCAYA YANG
BERPERAN AKTIF DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN
NEGARA YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT
UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA

Sedangkan misi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meliputi:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan Negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan.
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian Negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.



B. Visi dan Misi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Seperti halnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 merupakan dasar hukum dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun visi dari BPKP adalah :

**MENJADI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH BERKELAS DUNIA
DAN *TRUSTED ADVISOR* PEMERINTAH UNTUK MENINGKATAKN
GOOD COVERNANCE SEKTOR PUBLIK**

Sedangkan misi dari BPKP meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
2. Membanguna sumber daya pengawasan yang berkualitas

3.2. Tinjauan Terhadap RPJMD-SB Kabupaten Tabanan

A. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Tinjauan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 dilakukan karena Rencana Kerja merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah:

**Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta
Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman
Unggul Madan (AUM)**

Sedangkan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

**Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan
Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)**

B. Asta Program

Asta Program merupakan prinsip yang mendasari pembangunan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Perencanaan pembangunan dengan Asta Program memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka



mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan.

Asta Program meliputi:

1. Pembangunan Berbasis Reseach dan Inovasi Daerah
2. Data Desa Presisi
3. Reformasi Birokrasi
4. Pemabngunan Rohani dan Jasmani yang Sehat dan Kuat
5. Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Sosial
6. Pembangunan Hukum yang Berkeadilan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

C. Bidang Prioritas

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi Misi ditujukan 5 (lima) bidang prioritas yaitu :

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya.
5. Pariwisata.

Kelima bidang di atas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang memadai

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan

Perangkat Daerah wajib memiliki tujuan dan sasaran guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menggambarkan apa yang ingin dicapai, berorientasi lima (5) tahun kedepan untuk mencapai misi dan visi.



Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024 adalah:

Tujuan	1 : Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah
Indikator Tujuan	1 : Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Target	1 : Baik
Indikator Tujuan	
Sasaran	1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	1 : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Target	1 : B
Indikator Sasaran	
Tujuan	2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
Indikator Tujuan	2 : Kapabilitas APIP
Target	2 : Level 3
Indikator Tujuan	
Sasaran	2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	2 : Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP
Target	2 : 100%
Indikator Sasaran	

3.4. Program dan Kegiatan

1. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan.

Disamping pencapaian pada tahun 2022 menjadi catatan penting untuk merumuskan program, juga terdapat beberapa hal yang menentukan dalam merumuskan program dan kegiatan seperti:



- a. Issue strategis
- b. Rumusan program dan kegiatan stakeholder, khususnya BPK dan BPKP
- c. Perkembangan situasi terkini
- d. Ketersediaan anggaran

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Tahun anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan direncanakan melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah dirancang untuk dapat melaksanakan fungsi penjaminan mutu dan konsultasi bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tabanan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah:



Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Th. 2025)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
6 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Kab. Tabanan	100%	13.710.523.383,00	APBD Kab		100%	14.246.900.000,00
6 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	5.257.400,00			100%	5.510.000,00
6 01 01 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Tabanan	2 Dok	3.045.900,00			2 Dok	3.200.000,00
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tabanan	3 Dok	2.211.500,00			3 Dok	2.310.000,00
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	11.167.090.383,00			100%	11.626.225.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	11.167.090.383,00			100%	11.626.325.000,00
6	01	01	2	06	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Persentase SDM yang bersertifikat	Kab. Tabanan	100%	981.591.600,00			100%	1.050.000.000,00
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	Kab. Tabanan	76 Or	981.591.600,00			76 Or	1.050.000.000,00
6	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	689.476.400,00			100%	737.200.000,00
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Tabanan	1 Pkt	4.528.100,00			1 Pkt	4.700.000,00
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Tabanan	1 Pkt	15.718.200,00			1 Pkt	16.600.000,00
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Tabanan	1 Pkt	56.301.900,00			1 Pkt	60.300.000,00
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Tabanan	1 Paket	99.857.550,00			1 Paket	103.300.000,00
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	Kab. Tabanan	106 Dok	9.720.000,00			106 Dok	10.900.000,00
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	Kab. Tabanan	1 Pkt	155.502.650,00			1 Pkt	170.100.000,00
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Tabanan	15 Lap	337.852.000,00			15 Lap	360.800.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	9.996.000,00			100%	10.500.000,00
6	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan	100%	186.096.000,00			100%	200.000.000,00
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Tabanan	53 Unit	186.096.000,00			53 Unit	200.000.000,00
6	01	01	2	08	Penyediaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemangku administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	254.828.400,00			100%	269.300.000,00
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tabanan	12 Lap	11.991.000,00			12 Lap	12.600.000,00
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tabanan	12 Lap	55.199.400,00			12 Lap	60.000.000,00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Tabanan	12 Lap	187.638.000,00			12 Lap	196.700.000,00
6	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemangku administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	426.183.200,00			100%	467.566.000,00
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kab. Tabanan	23 Unit	375.353.200,00			23 Unit	400.000.000,00
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Tabanan	50 Unit	50.830.000,00			50 Unit	57.565.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kab. Tabanan	1 Unit	-			1 Unit	-
		6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN	Kab. Tabanan	100%	1.024.682.000,00	APBD Kab		100%	1.096.000.000,00
6	01	02	2	01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Tabanan	100%	888.582.000,00			100%	920.000.000,00
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	7 LHP	88.086.000,00			7 LHP	100.000.000,00
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah daerah	Kab. Tabanan	12 LHP	228.320.000,00			12 LHP	240.000.000,00
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Kab. Tabanan	3 LHR	91.840.000,00			3 LHR	100.000.000,00
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Kab. Tabanan	4 LHR	108.640.000,00			4 LHR	115.000.000,00
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	Kab. Tabanan	10 LHP	229.440.000,00			10 LHP	245.000.000,00
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah dokumen kesepakatan	Kab. Tabanan	1 Kesepakatan	21.144.000,00			1 Kesepakatan	22.000.000,00
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APUP	Kab. Tabanan	12 Dok	91.082.000,00			12 Dok	98.000.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	022	02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tabanan	100%	166.130.000,00			100%	176.000.000,00
6	01	022	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang	Kab. Tabanan	2 Lap	102.730.000,00			2 Lap	110.000.000,00
6	01	022	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Kab. Tabanan	3 Lap	63.400.000,00			3 Lap	66.000.000,00
		6 01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG TELAH DI LAKUKAN	Kab. Tabanan	100%	574.275.300,00	APBD Kab		100%	631.800.000,00
6	01	032	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis dan Fasilitas Pengawasan yang dapat Dirumuskan	Kab. Tabanan	100%	20.615.300,00			100%	21.600.000,00
6	01	032	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	Kab. Tabanan	2 Dok	20.615.300,00			2 Dok	21.600.000,00
6	01	032	02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Pendampingan dan Asistensi	Kab. Tabanan	100%	552.660.000,00			100%	610.200.000,00
6	01	032	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Kab. Tabanan	40 PD	91.230.000,00		40 PD	100%	96.200.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian, reformasi birokrasi urusan pemerintah daerah	Kab. Tabanan	40 PD	12.800.000,00		40 PD	100%	13.500.000,00
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Kab. Tabanan	12 Kali	449.630.000,00			12 kali	500.500.000,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Sedangkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/36/02/HK/2023 tentang Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Tahun 2023.

Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan jaminan mutu dan konsultasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan dan pengawasan tersebut, maka disusun rencana kegiatan sebagaimana terurai pada tabel 4.1., berikut ini.



Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan T.A.2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
							Input (Rp)	Output		Outcome	
								Uraian	Target	Uraian	Target
1					2	3	4	5	6	7	8
6					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
6	01				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		13.710.523.383,00				
6	01	01			Program Peningkat Urusan Pemerintahan daerah/kabupaten/kota	Kab. Tabanan	13.710.523.383,00			Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kab. Tabanan	5.257.400,00	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	Nilai LKJP	71
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	3.045.900,00	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dok		
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tabanan	2.211.500,00	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Dok		
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	11.167.090.348,00	Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	100%	Nilai LKJP	71
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabanan	11.167.090.383	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	981.591.600,00	Persentase SDM yang bersertifikat	100%	Nilai LKJP	71
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tabanan	981.591.600,00	Jumlah SDM yang mengikuti Didlat	76 Or		
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	689.476.400,00	Persentase terpenuhinya pemangaj administrasi umum perkantoran	100%	Nilai LKJP	71
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tabanan	4.528.100,00	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Pkt		
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tabanan	15.718.200,00	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Pkt		
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tabanan	56.301.900,00	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Pkt		
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tabanan	99.857.550,00	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket		
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tabanan	9.720.000,00	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	106 Dok		
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tabanan	155.502.650,00	Jumlah bahan/material yang disediakan	1 Pkt		
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabanan	337.852.000,00	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 lap		
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tabanan	9.996.000,00	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi	100%		



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	186.096.000,00	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	Nilai LKJP	71
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	186.096.000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	53 Unit		
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	284.828.400,00	Persentase terpenuhinya pemungjung administrasi umum perkantoran	100%	Nilai LKJP	71
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabanan	11.991.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap		
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabanan	55.199.400	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap		
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabanan	187.638.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Lap		
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah		426.183.200,00	Persentase terpenuhinya pemungjung administrasi umum perkantoran	100%	Nilai LKJP	71
6	01	01	2.09	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tabanan	375.353.200	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	23 Unit		
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	50.830.000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit		
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tabanan	-	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit		
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Tabanan	204.582.000,00			Persentase Capaian Program Kerja Pemerintahan Kabupaten	100%
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Tabanan	288.582.000,00	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%



Kabupaten Tabanan

6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	88.086.000	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	7 LHP		
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	228.320.000	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah daerah	12 LHP		
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tabanan	91.840.000	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	3 LHR		
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tabanan	108.640.000	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	4 LHR		
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Kab. Tabanan	229.440.000	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	10 LHP		
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Tabanan	21.144.000	Jumlah dokumen kesepakatan	1 Kesepakatan		
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APMP	Kab. Tabanan	91.082.000	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APMP	12 Dok		
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tabanan	168.130.000,00	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Tabanan	102.730.000	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Lap		
6	01	02	2.02	02	Penanganan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tabanan	63.400.000	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	3 Lap		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		574.275.300,00			Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	100%
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		20.618.300,00	Persentase Kebijakan Teknis dan Fasilitas Pengawasan yang dapat Drukanakan	100%	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%



Kabupaten Tabanan

6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Tabanan	20.615.300	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	2 Dok		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		553.660.000,00	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Pendampingan dan Asistensi	100%	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	91.230.000	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	40 PD		
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tabanan	12.800.000	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian, reformasi birokrasi urusan pemerintah daerah	40 PD		
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tabanan	449.630.000	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.	12 Kali		



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan 2024. Disamping itu, Rencana Kerja ini juga disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya di Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Tahun 2024 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, kami berharap Renja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024.

Tabanan, 10 Agustus 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19661030 198610 1 003



Lampiran 1.

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
(Perbub No.:104 Tahun 2022)

